ABSTRACT

The Capability of Kabupaten Tanah Datar Region in Autonomy Implementation Reviewed From the Financial Aspect

Rizki Rahmadhani

The aspect of regional financial capability is one of the basic criteria to be able to know clearly the ability of regions in implementing autonomy and financing the needs of regional finances without having to always rely on assistance from the central government. The purpose of this research is to figure out the capability of Kabupaten Tanah Datar region in autonomy implementation reviewed from the financial aspect which is observed from the regional finance independence ratio, the degree of fiscal decentralization ratio, regional financial efficiency ratio, the affectivity of original local government revenue ratio, regional taxes ratio, and the analysis of that trend ratio.

This research uses a descriptive quantitative method which is strengthen by a qualitative approach. This research is conducted at Management of Regional Revenue, Finance,and Assets Office in Kabupaten Tanah Datar. The informants for this research is determined by using purposive and snowball sampling technique. Data use in this research are primer and secondary data. The data is collected through interview and documentation. The technique use for testing the validity of the data are source triangulation and method triangulation. And the data is analyzed by using descriptive, quantitative and qualitative analysis techniques.

The result of the research shows that the regional finance independence ratio is at average by 9.3% and very low category. The ratio of the degree of fiscal decentralization is at average by 8.5% and very less category. The ratio of regional financial efficiency is at average by 108.5% and not efficient category. The ratio of original local government revenue effectively is at average by 101.8% and very effective. The taxes ratio toward the original local government revenue is at average by 11.84% and less category.

Based on the results of this study indicates that Tanah Datar has not been able to implement autonomy in terms of financial aspects. Therefore, the Regional Government should be able to increase the PAD, need to coordinate with the Regional Device Organization (OPD) that manages local taxes and charges and establish partnerships with stakeholders. Furthermore, for the OPD that manages taxes and retribution when not reaching the target revenue PAD should be given sanctions in the form of disincentives by local government.

ABSTRAK

Kemampuan Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Pelaksanaan Otonomi Ditinjau Dari Aspek Keuangan

Rizki Rahmadhani

Aspek kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi dan membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dari pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan daerah Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaan otonomi ditinjau dari aspek keuangan yang dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio pajak daerah dan analisis *trend* rasio tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang diperkuat dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data ini penulis kumpulkan dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berada pada rata-rata persentase 9,3% yang dikategorikan rendah sekali. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) berada pada rata-rata persentase 8,5% yang dikategorikan sangat kurang. Rasio efisiensi keuangan daerah berada pada persentase rata-rata 108,5% yang dikategorikan tidak efisien. Rasio efektivitas PAD berada pada rata-rata 101,8% yang dikategorikan sangat efektif. Rasio pajak terhadap PAD berada pada rata-rata 11,84% yang dikategorikan kurang.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Datar belum mampu melaksanakan otonomi ditinjau dari aspek keuangan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan PAD, perlu melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola pajak dan retribusi daerah dan menjalin kemitraan dengan para *stakeholder*. Selanjutnya, bagi OPD yang mengelola pajak dan retribusi apabila tidak mencapai target penerimaan PAD seharusnya diberikan sanksi berupa disinsentif oleh pemerintah daerah.